



LAPORAN KINERJA

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
TRIWULAN III 2025





KATA PENGANTAR

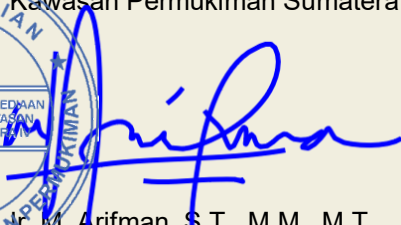
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Triwulan III Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV Tahun Anggaran 2025 dengan baik.

Dokumen Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memuat Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Target Kinerja, Capaian Target, Permasalahan atau Potensi Capaian Triwulan BP3KP Sumatera IV serta Rencana Tindak Lanjut atas permasalahan pada triwulan sebelumnya. Laporan Kinerja Triwulan yang disusun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV menggambarkan capaian terhadap 5 (lima) Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Hasil dari Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV ini selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas tersajinya laporan ini. Untuk semua masukan dan koreksi akan kami jadikan perbaikan dalam penyusunan laporan pada periode selanjutnya.

Jambi, 30 September 2025
Kepala Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sumatera IV




W. M. Arifman, S.T., M.M., M.T.
19750922 200212 1 003

KEPALA BALAI P3KP SUMATERA IV

IR. M. ARIFMAN S.T, M.T.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1. LATAR BELAKANG	6
1.2. TUGAS DAN FUNGSI	7
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	8
BAB 2 CAPAIAN KINERJA	10
2.1. TARGET KINERJA TW I / II / III / IV BERDASARKAN DOKUMEN RENCANA AKSI KINERJA	10
2.1.1. Target Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal	10
2.1.2. Target Kinerja DIPA Ditjen Kawasan Permukiman	11
2.1.3. Target Kinerja DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan	12
2.1.4. Target Kinerja DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan	12
2.1.5. Target Kinerja DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	13
2.2. CAPAIAN TARGET TRIWULAN – III	14
2.2.1. Capaian Target TW-III DIPA Sekretariat Jenderal	14
2.2.2. Capaian Target TW-III DIPA Ditjen Kawasan Permukiman	15
2.2.3. Capaian Target TW-III DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan	16
2.2.4. Capaian Target TW-III DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan	17
2.2.5. Capaian Target TW-III DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	19
2.3. PERMASALAHAN / POTENSI CAPAIAN TRIWULAN	20
BAB 3 PENUTUP	21
3.1. RENCANA TINDAK LANJUT	21
3.2. BUKTI TINDAK LANJUT PERMASALAHAN TRIWULAN SEBELUMNYA	21
LAMPIRAN	22





BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.

Proses monitoring dan evaluasi merupakan pengendalian yakni bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Monitoring atau pemantauan dapat mempermudah kita dalam mengamati terus – menerus *trend* dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Evaluasi tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil – hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program yang tidak tepat dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah itu.

Upaya monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melakukan pendampingan dan pengarahan kepada pemangku kepentingan setempat. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung dan menyukseskan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja Triwulan III Tahun 2025.

Monitoring dan Evaluasi di lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang sesuai kondisi di lapangan dan langsung mengenai perkembangan pelaksanaan Kegiatan Randal terutama Kegiatan Fisik diantaranya, Rumah Swadaya, Rumah Susun, Rumah Khusus dan Rumah Umum dan Komersial, serta kendala – kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Langkah yang diambil dalam mengatasi kendala – kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan sehingga diharapkan dari hasil kegiatan pembangunan fisik berjalan dengan sesuai rencana. Hasil monitoring dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan saran, masukan dan rekomendasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dan upaya – upaya untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan agar dapat dicapai pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Dengan diadakan monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja Triwulan III Tahun 2025 ini diharapkan semua pembangunan rumah swadaya, rumah susun dan rumah khusus, PSU, yang tersebar di Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu dapat di pantau secara berkala, berjenjang guna agar tercapainya pembangunan tepat waktu dan masukan kebijakan perencanaan pembangunan selanjutnya

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial,

dan fasilitasi serah terima aset. Dalam menjalankan tugasnya BP3KP Sumatera IV menjalankan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 STUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi UPT, dalam hal ini Balai, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Tata Usaha;
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I;
- c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tugas Jabatan pada BP3KP Sumatera IV yaitu :

No.	Jabatan	Tugas
1	Kepala Balai	a. Penanggung jawab utama atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP di wilayah kerja Sumatera IV.
1	Subbagian Umum dan Tata Usaha	a. Melakukan penyusunan program dan anggaran, b. Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, c. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, d. Melakukan pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, e. Melakukan koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

2	Seksi Pelaksanaan Wilayah I	a. Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial; dan b. Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
3	Seksi Pelaksanaan Wilayah II	Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
4	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan



BAB II

CAPAIAN KINERJA



BAB II CAPAIAN KINERJA

Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memiliki 5 (lima) DIPA yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sedangkan Satker PKP Provinsi Bengkulu dan Satker PKP Provinsi Jambi memiliki 4 (empat) DIPA yang sama dengan Balai kecuali DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Rincian Kode Satker tiap DIPA dapat dilihat pada tabel berikut :

BALAI / SATKER	KODE SATKER / DIPA				
	SEKJEN	DITJEN KP	DITJEN PERDESA AN	DITJEN PERKOTA AN	DITJEN TKPR
BP3KP SUMATERA IV	691387	691441	691495	691549	691598
SATKER PKP PROVINSI BENGKULU	691389	691443	691497	691551	
SATKER PKP PROVINSI JAMBI	691388	691442	691496	691550	

Sumber : Analisis BP3KP Sum IV

2.1. TARGET KINERJA TW I / II/ III/ IV

Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV yang tertuang didalam Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 merupakan gabungan target kinerja untuk BP3KP Sumatera IV, Satker PKP Provinsi Bengkulu dan Satker PKP Provinsi Jambi dan terdiri dari 5 (Lima) DIPA Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pegendalian Risiko. Berikut penjelasan mengenai Target Kinerja Tahun 2025 :

2.1.1. Target Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Sekretariat Jenderal di Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
Program Sekretariat Jenderal							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	3 Layanan	0%	0%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Renaksi BP3KP Sumatera IV

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Sekretariat Jenderal di Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 20% terhadap Target Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal tanggal 01 Juli 2025. Indikator Kinerja berupa Tingkat Layanan Dukungan Manajemen dari unsur BP3KP Sumatera IV, Satker PKP Bengkulu dan Satker PKP Jambi.

2.1.2. Target Kinerja DIPA Ditjen Kawasan Permukiman

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman di Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
Program Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman							
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	1 Laporan	0%	0%	20%	100%
		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	0%	0%	20%	100%
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan	0%	0%	20%	100%
		Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	286 Unit	0%	0%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Renaksi BP3KP Sumatera IV Tahun 2025

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman di Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 20% terhadap Target Perjanjian Kinerja Awal Ditjen Kawasan Permukiman tanggal 13 September 2025. Target Kinerja Ditjen Kawasan Permukiman terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 4 (empat) Indikator Kinerja.

2.1.3. Target Kinerja DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan di Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
Program Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan							
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah kegiatan Koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Kegiatan	0%	0%	20%	100%
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan	0%	0%	20%	100%
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1078 Unit	0%	0%	20%	100%

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan di Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 20% terhadap Target Perjanjian Kinerja Revisi I Ditjen Perumahan Perdesaan tanggal 21 Agustus 2025. Target Kinerja Ditjen Perumahan Perdesaan terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja.

2.1.4. Target Kinerja DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan di Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
Program Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah laporan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan.	1 Laporan	0%	0%	20%	100%
		Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan	0%	0%	20%	100%
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Laporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	1 Laporan	0%	0%	20%	100%
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Laporan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Laporan	0%	0%	20%	100%
		Jumlah unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Perkotaan	284 Unit	0%	0%	20%	100%

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan di Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 20% terhadap Target Perjanjian Kinerja Revisi II Ditjen Perumahan Perkotaan tanggal 25 Agustus 2025. Target Kinerja Ditjen Perumahan Perkotaan terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) Indikator Kinerja.

2.1.5. Target Kinerja DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
Program Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko							
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	0%	0%	20%	100%
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	0%	0%	20%	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
	korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 20% terhadap Target Perjanjian Kinerja Awal Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tanggal 24 Juni 2025. Target Kinerja Ditjen Perumahan Perkotaan terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 2 (dua) Indikator Kinerja.

2.2. CAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULAN – III

Capaian target kinerja menggambarkan capaian kinerja khususnya pada triwulan III terhadap target PK maupun terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 yang sudah dibahas sebelumnya. Capaian target meliputi capaian kinerja program dan capaian kinerja kegiatan yang merujuk pada target yang tertuang pada PK terakhir dalam triwulan III. Berikut ini adalah gambaran capaian triwulan III pada unit kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV.

2.2.1. Capaian Kinerja TW-III DIPA Sekretariat Jenderal

Capaian Kinerja TW-III BP3KP Sumatera IV pada DIPA Sekretariat Jenderal dinilai terhadap Target Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal tanggal 01 Juli 2025. Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada Triwulan III Adalah sebesar 29,22%.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Triwulan III BP3KP Sumatera IV (DIPA Sekretariat Jenderal)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TW-III					
				Target	PAGU TW-III	RENCANA	%	CAPAIAN	%
Program Sekretariat Jenderal			Layanan	3	1.561.666.000	446.336.080	28,58	456.264.569	29,22
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	3	1.561.666.000	446.336.080	28,58	456.264.569	29,22
		Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	837.518.000	301.506.480	36,00	306.521.173	36,60
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	396.527.000	79.305.400	20,00	85.892.051	21,66
		Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	327.621.000	65.524.200	20,00	63.851.345	19,49

Sumber : Analisis 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara Target dan Capaian kinerja pada Triwulan III. Target Kinerja untuk DIPA Sekretariat Jenderal pada Triwulan III ditetapkan sebesar 28,58%, dengan capaian per 30 September 2025 sebesar 29,22%. Terdapat selisih antara capaian dan target sebesar + 0,64% melebihi rencana, dengan kata lain target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi pada Triwulan III sudah tercapai, tetap perlu dilakukan evaluasi ke depannya sebagai langkah optimalisasi penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya.

2.2.2. Capaian Target TW-III DIPA Ditjen Kawasan Permukiman

Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman di Triwulan III Tahun 2025 dinilai terhadap Target Perjanjian Kinerja Awal Ditjen Kawasan Permukiman tanggal 13 September 2025. Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada Triwulan III Adalah sebesar 1,99%.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Triwulan III BP3KP Sumatera IV (DIPA Ditjen Kawasan Permukiman)

No	Sasaran Kegiatan an	Indikator Kinerja	Satuan	TW-III					
				Target	PAGU TW-III	RENCANA	%	CAPAIAN	%
Program Direktorat Jenderal Kawasan Per mukiman					7.142.924.0 00	134.582.855	1,88	141.803.314	1,99
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Laporan	1	50.000.000	1.000.000	2,00	830.000	1,66
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	50.000.000	1.000.000	2,00	830.000	1,66
		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	84.310.000	21.077.500	25,00	21.498.977	25,50
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	84.310.000	21.077.500	25,00	21.498.977	25,50
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan	Laporan	3	496.440.000	91.080.000	18,35	89.796.017	18,09

		Kumuh							
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	330.300.000	49.545.000	15,00	46.957.370	14,22
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	85.026.000	21.256.500	25,00	22.811.600	26,83
		Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	81.114.000	20.278.500	25,00	20.027.047	24,69
		Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	286	6.512.174.000	21.425.355	0,33	29.678.320	0,46
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	59	1.428.357.000	21.425.355	1,5	29.678.320	2,08
		Satker PKP Prov. Jambi	Unit	227	5.083.817.000	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Ha		-			0	
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Ha						

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara Target dan Capaian kinerja pada Triwulan III. Target Kinerja untuk DIPA Ditjen Kawasan Permukiman pada Triwulan III ditetapkan sebesar 1,88%, dengan capaian per 30 September 2025 sebesar 1,99%. Terdapat selisih antara capaian dan target sebesar + 0,10% melebihi rencana, dengan kata lain target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi pada Triwulan III sudah tercapai, tetap perlu dilakukan evaluasi ke depannya sebagai langkah optimalisasi penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya.

2.2.3. Capaian Target TW-III DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan

Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan di Triwulan III Tahun 2025 dinilai terhadap Target Perjanjian Kinerja Revisi I Ditjen Perumahan Perdesaan tanggal 21 Agustus 2025. Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada Triwulan III Adalah sebesar 0,27%.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Triwulan III BP3KP Sumatera IV (DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TW-III					
----	------------------	-------------------	--------	--------	--	--	--	--	--

	n			Target	PAGU TW-III	RENCANA	%	CAPAIAN	%
Program Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					23.608.254.000	65.119.400	0,28	63.512.612	0,27
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah kegiatan Koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	171.176.000	42.794.000	25	42.082.612	24,58
		Balai P3KP Sumatera IV	Kegiatan	1	171.176.000	42.794.000	25	42.082.612	24,58
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	219.146.000	22.325.400	10,19	21.430.000	9,78
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	0					
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	111.627.000	22.325.400	20	21.430.000	19,20
		Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	107.519.000			0	0
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	1078	23.217.932.000	-	0	0	0
		Satker PKP Prov. Jambi	Unit	1078	23.217.932.000	-	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara Target dan Capaian kinerja pada Triwulan III. Target Kinerja untuk DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan pada Triwulan III ditetapkan sebesar 0,28%, dengan capaian per 30 September 2025 sebesar 0,27%. Terdapat selisih antara capaian dan target sebesar - 0,01% dibawah rencana, dengan kata lain target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi pada Triwulan III belum tercapai dan perlu dilakukan evaluasi ke depannya sebagai langkah optimalisasi penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya.

2.2.4. Capaian Target TW-III DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan

Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan di Triwulan III Tahun 2025 dinilai terhadap Target Perjanjian Kinerja Revisi II Ditjen Perumahan Perkotaan tanggal 25 Agustus 2025. Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada Triwulan III Adalah sebesar 2,61%.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Triwulan III BP3KP Sumatera IV (DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TW-III					
				Target	PAGU TW-III	RENCANA	%	CAPAIAN	%

Program Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					8.405.784.000	189.755.180	2,26	219.439.375	2,61
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah laporan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan.	Laporan	1	366.720.000	33.004.800	9,00	35.717.000	9,74
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	366.720.000	33.004.800	9,00	35.717.000	9,74
		Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	1.231.446.000	104.709.280	8,50	120.711.074	9,80
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	220.942.000	8.837.680	4,00	9.128.480	4,13
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	504.104.000	75.615.600	15,00	87.680.514	17,39
		Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	506.400.000	20.256.000	4,00	23.902.080	4,72
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Laporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Laporan	1	171.235.000	0	0	0	0
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	171.235.000	0	0	0	0,00
		Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	-	-			0	
		Satker PKP Prov. Jambi	Unit	0	-	0	0	0	0
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Laporan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Laporan	1	312.470.000	37.496.400	12,00	39.411.301	12,61
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	312.470.000	37.496.400	12,00	39.411.301	12,61
		Jumlah unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	284	6.323.913.000	14.544.700	0,23	23.600.000	0,37
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	62	1.454.470.000	14.544.700	1	23.600.000	1,62
		Satker PKP Prov. Jambi	Unit	222	4.869.443.000	0	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara Target dan Capaian kinerja pada Triwulan III. Target Kinerja untuk DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan pada Triwulan III ditetapkan sebesar 2,26%, dengan capaian per 30 September 2025 sebesar 2,61%. Terdapat selisih antara capaian dan target sebesar - 0,35% melebihi rencana, dengan kata lain target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi pada Triwulan III telah tercapai, tetap perlu dilakukan evaluasi ke depannya sebagai langkah optimalisasi penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya.

2.2.5. Capaian Target TW-III DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Triwulan III Tahun 2025 dinilai terhadap Target Perjanjian Kinerja Awal Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tanggal 04 Juli 2025. Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada Triwulan III Adalah sebesar 11,24%.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Triwulan III BP3KP Sumatera IV (Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TW-III					
				Target	PAGU TW-III	RENCANA	%	CAPAIAN	%
Program Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				2	303.466.000	33.104.270	10,91	34.096.546	11,24
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomen dasi Kebijakan	1	129.233.000	0	0	0	0
		Balai P3KP Sumatera IV	Rekomen dasi Kebijakan	1	129.233.000	0	0	0	0
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomen dasi Kebijakan	1	174.233.000	33.104.270	19	34.096.546	19,57
		Balai P3KP Sumatera IV	Rekomen dasi Kebijakan	1	174.233.000	33.104.270	19	34.096.546	19,57

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara Target dan Capaian kinerja pada Triwulan III. Target Kinerja untuk DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Triwulan III ditetapkan sebesar 10,91%, dengan capaian per 30 September 2025 sebesar 11,24%. Terdapat selisih antara capaian dan target sebesar 0,33% melebihi rencana, dengan kata lain target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi pada Triwulan III telah tercapai, tetap perlu dilakukan evaluasi ke depannya sebagai langkah optimalisasi penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya.

2.3. PERMASALAHAN/POTENSI CAPAIAN TRIWULAN III

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERMASALAHAN
A. Meningkatkan layanan dukungan manajemen		
Tingkat layanan dukungan manajemen	1 Layanan	Daya Listrik pada Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mencukupi kebutuhan, sehingga sering drop
B. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman		
Tingkat layanan dukungan manajemen	1 Layanan	Daya Listrik pada Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mencukupi kebutuhan, sehingga sering drop
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat
Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	268 Unit	Permasalahan Administratif: Terdapat satu Penerima Bantuan (PB) di Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur (atas nama Permata) yang mengundurkan diri secara resmi dikarenakan ketidakanggupan mengikuti aturan juknis BSPS.
		Akses Jalan: Desa Rantau Jaya dan Trimulyo mengalami keterlambatan pengiriman bahan akibat akses jalan yang baru dibuka pasca perbaikan pada 6 Desember 2025. Kerusakan jalan yang parah dan penutupan jalan juga menghambat distribusi di Desa Nipah Panjang I, Nipah Panjang II, Bangun Karya, Pematang Mayan, Sungai Jambat, dan Sungai Sayang.
		Ketersediaan Material: Teridentifikasi kelangkaan atau keterlambatan spesifik pada material seng (Desa Saimpang Jelita), batu bata (Desa Bangun Karya, Pematang Mayan), dan kayu (Desa Sungai Jambat, Sungai Sayang).
		Kendala Alam: Faktor banjir dan banjir ROB menjadi penghambat utama progres fisik di Desa Nipah Panjang I, Nipah Panjang II, Sungai Jambat, dan Sungai Sayang.
		Kendala Sosial: Di Desa Trijaya, terdapat 1 unit (progres
C. Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan		

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERMASALAHAN
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat
D. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan		
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat
Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan		Pengunduran Diri: Tercatat tiga kasus pengunduran diri karena ketidakanggupan mengikuti aturan, yaitu dua PB di Desa Pematang Kabau (Kab. Sarolangun) dan satu PB di Desa Teluk Singkawang (Kab. Tebo).
		Pergantian PB: Di Kabupaten Sarolangun, mekanisme penggantian (reshuffle) telah dilakukan melalui SK Dirjen Perumahan Perdesaan tertanggal 21 November 2025. Dari daftar pengganti tersebut, tiga PB dilaporkan meninggal dunia (Desa Bukit Suban, Simpang Kertopati, Sungai Gedang) dan telah dialihkan kepada ahli waris dengan konstruksi yang sudah berjalan.
		Faktor Alam (Cuaca & Pasang Surut): Curah hujan tinggi dan kondisi air sungai pasang menjadi penyebab utama terhambatnya mobilisasi material (pasir dan kerikil) di Kabupaten Sarolangun (Desa Bukit Suban, Pematang Kabau, Simpang Kertopati, Butang Baru, Petiduran Baru, Jati Baru Mudo). Kondisi cuaca hujan juga secara umum menghambat pekerjaan fisik di Kabupaten Muaro Jambi, Merangin, Batanghari, dan Bungo.
		Rantai Pasok Material: Keterlambatan material akibat akses dan cuaca terjadi secara masif. Kendala spesifik meliputi material batu bata (Desa Berkun, Meribung, Napal Melintang, Siliwangi, Tanjung Baru, Suka Makmur) dan pasir (Desa Tiaro, Sungai Gedang).

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERMASALAHAN
		Tenaga Kerja: Di Kabupaten Batanghari dan Bungo, progres fisik terhambat akibat faktor tukang yang sakit atau sistem kerja tukang yang bergiliran, menyebabkan penyelesaian unit rumah menjadi lebih lambat.
E. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat
F. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan		
Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1 Unit	Keterlambatan Finalisasi Design Bangunan: Design Bangunan oleh Pusat terlambat finalisasi, sehingga waktu pelaksanaan proyek dan pembangunan rumah susun mundur
		Keterlambatan Progres (Deviasi Negatif): Terjadi deviasi minus sebesar -0,09%, di mana realisasi di lapangan hanya mencapai 0,16% dari target rencana sebesar 0,25%.
G. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan		
Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	219 Unit	Permasalahan Keuangan (Upah Tukang): Terdapat kendala pencairan upah Kepala Tukang di Desa Koto Bento dan Desa Koto Keras melalui Bank BNI. Hal ini menjadi krusial mengingat Kepala Tukang Desa Koto Bento berencana meninggalkan lokasi untuk pekerjaan lain, dan Kepala Tukang Desa Koto Keras telah pindah domisili ke Medan.
		Hambatan Cuaca: Curah hujan yang tinggi menyebabkan keterlambatan progres fisik (masih pada kisaran 0-30%) di lima desa, yaitu Desa Baru Debai, Air Teluh, Kumun Hilir, Pondok Agung, dan Pondok Tinggi.



BAB III

PENUTUP



BAB III

PENUTUP

3.1. RENCANA TINDAK LANJUT

INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
A. Meningkatnya layanan dukungan manajemen		
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Daya Listrik pada Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mencukupi kebutuhan, sehingga sering drop	Koordinasi dengan Pihak Terkait: Melaksanakan Rapat Koordinasi progress dan pelaporan bulanan Percepatan Pelaporan: Percepatan pembentukan laporan bulanan TFL dan Koordinator, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
B. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman		
Jumlah Laporan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat	Koordinasi dengan Pihak Terkait: Melaksanakan Rapat Koordinasi progress dan pelaporan bulanan Percepatan Pelaporan: Percepatan pembentukan laporan bulanan TFL dan Koordinator, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Permasalahan Administratif: Terdapat satu Penerima Bantuan (PB) di Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur (atas nama Permata) yang mengundurkan diri secara resmi dikarenakan ketidakmampuan mengikuti aturan juknis BSPS.	Pemindahbukuan Dana: Melakukan pemindahbukuan dana bantuan dari Rekening Penerima Bantuan kembali ke Rekening Penyaluran (RPL) Satker. Koordinasi dengan Dirjen KP: Melakukan Koordinasi dengan Dirjen KP terkait SK Pengganti CPB
	Akses Jalan: Desa Rantau Jaya dan Trimulyo mengalami keterlambatan pengiriman bahan akibat akses jalan yang baru dibuka pasca perbaikan pada 6 Desember 2025. Kerusakan jalan yang parah dan penutupan jalan juga menghambat distribusi di Desa Nipah Panjang I, Nipah Panjang II, Bangun Karya, Pematang Mayan, Sungai Jambat, dan Sungai Sayang. Ketersediaan Material:	Melakukan koordinasi intensif dengan Penyedia untuk segera mengirimkan kekurangan bahan pada saat jeda





INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Teridentifikasi kelangkaan atau keterlambatan spesifik pada material seng (Desa Saimpang Jelita), batu bata (Desa Bangun Karya, Pematang Mayan), dan kayu (Desa Sungai Jambat, Sungai Sayang). Kendala Alam: Faktor banjir dan banjir ROB menjadi penghambat utama progres fisik di Desa Nipah Panjang I, Nipah Panjang II, Sungai Jambat, dan Sungai Sayang. Kendala Sosial: Di Desa Trijaya, terdapat 1 unit (progres 0-30%) yang terkendala karena PB tergolong lansia dan berkebutuhan khusus, sehingga pelaksanaan fisik masih menunggu jadwal gotong royong warga setempat.	Mendorong Gotong Royong dalam Menyelesaikan Masalah KPB: Mendesak pelaksanaan gotong royong bagi PB lansia/disabilitas mengingat sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran yang semakin mendesak.
C. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan		
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat	Koordinasi dengan Pihak Terkait: Melaksanakan Rapat Koordinasi progress dan pelaporan bulanan Percepatan Pelaporan: Percepatan pembentukan laporan bulanan TFL dan Koordinator, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
D. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan		
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat	Koordinasi dengan Pihak Terkait: Melaksanakan Rapat Koordinasi progress dan pelaporan bulanan Percepatan Pelaporan: Percepatan pembentukan laporan bulanan TFL dan Koordinator, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
Jumlah Rumah Swadaya Perumahan	Pengunduran Diri: Tercatat tiga kasus pengunduran diri karena ketidakmampuan mengikuti aturan, yaitu dua PB di Desa Pematang Kabau (Kab. Sarolangun) dan satu PB di Desa Teluk Singkawang (Kab. Tebo).	Koordinasi dengan Dirjen Perumahan Perdesaan: Satker menunggu instruksi lebih lanjut dari Dirjen Perumahan Perdesaan terkait status dana (apakah dicarikan pengganti atau dikembalikan ke negara). Hal ini merujuk pada Surat Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Resiko No. RU1003-Dt/206 tanggal 28 November 2025 poin h, yang menyatakan





INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		usulan pergantian CPB/PB setelah tanggal 17 November 2025 tidak diperkenankan lagi. Pemindahbukuan Dana: Dana langsung dipindahbukukan dari Rekening PB ke Rekening Penyaluran (RPL) Satker, dengan merujuk pada dasar hukum surat Dirjen yang sama (batas waktu 17 November 2025).
	Pergantian PB: Di Kabupaten Sarolangun, mekanisme penggantian (reshuffle) telah dilakukan melalui SK Dirjen Perumahan Perdesaan tertanggal 21 November 2025. Dari daftar pengganti tersebut, tiga PB dilaporkan meninggal dunia (Desa Bukit Suban, Simpang Kertopati, Sungai Gedang) dan telah dialihkan kepada ahli waris dengan konstruksi yang sudah berjalan.	Pendampingan dalam Percepatan: Melakukan pendampingan intensif untuk percepatan pelaksanaan fisik agar progres tidak tertinggal jauh, mengingat waktu pelaksanaan yang sangat terbatas.
	Faktor Alam (Cuaca & Pasang Surut): Curah hujan tinggi dan kondisi air sungai pasang menjadi penyebab utama terhambatnya mobilisasi material (pasir dan kerikil) di Kabupaten Sarolangun (Desa Bukit Suban, Pematang Kabau, Simpang Kertopati, Butang Baru, Petiduran Baru, Jati Baru Mudo). Kondisi cuaca hujan juga secara umum menghambat pekerjaan fisik di Kabupaten Muaro Jambi, Merangin, Batanghari, dan Bungo.	Koordinasi dengan Toko Penyedia: Berkoordinasi dengan toko penyedia bangunan untuk memprioritaskan pengiriman item spesifik (pasir/batu bata) segera setelah kondisi cuaca/air sungai surut.
	Rantai Pasok Material: Keterlambatan material akibat akses dan cuaca terjadi secara masif. Kendala spesifik meliputi material batu bata (Desa Berkun, Meribung, Napal Melintang, Siliwangi, Tanjung Baru, Suka Makmur) dan pasir (Desa Tiaro, Sungai Gedang).	Pembuatan Surat Pernyataan Komitmen Toko Penyedia: Di Kabupaten Muaro Jambi, langkah preventif dilakukan dengan





INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Tenaga Kerja: Di Kabupaten Batanghari dan Bungo, progres fisik terhambat akibat faktor tukang yang sakit atau sistem kerja tukang yang bergiliran, menyebabkan penyelesaian unit rumah menjadi lebih lambat.	Memberikan Saran pada PB: Menyarankan PB untuk mencari tukang pengganti/tambahan (tidak menunggu giliran) agar pekerjaan tidak terhenti. Memberikan Saran pada PB: Menyiasati jam kerja tukang dengan memaksimalkan pengerjaan saat kondisi tidak hujan.
E. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat	Koordinasi dengan Pihak Terkait: Melaksanakan Rapat Koordinasi progress dan pelaporan bulanan Percepatan Pelaporan: Percepatan pembentukan laporan bulanan TFL dan Koordinator, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
F. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan		
Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Keterlambatan Finalisasi Design Bangunan: Design Bangunan oleh Pusat terlambat finalisasi, sehingga waktu pelaksanaan proyek dan pembangunan rumah susun mundur	Koordinasi dengan Pusat: Koordinasi percepatan, Namun Timeline untuk memulai pelaksanaan proyek tetap terlambat
	Keterlambatan Progres (Deviasi Negatif): Terjadi deviasi minus sebesar -0,09%, di mana realisasi di lapangan hanya mencapai 0,16% dari target rencana sebesar 0,25%.	Finalisasi Data Awal: Kontraktor dan Konsultan diwajibkan segera menyelesaikan laporan pengukuran <i>Uitzet</i> dan perhitungan MC-0 (<i>Mutual Check 0</i>). Penguatan Administrasi & Pengawasan: Konsultan Pengawas harus segera melengkapi dokumen administrasi (Berita Acara, Persetujuan Material, dll) dan melakukan koordinasi intensif terkait sinkronisasi data teknis (Gambar dan RAB).
	Kekurangan Tenaga Kerja: Jumlah tenaga kerja di lapangan dinilai belum optimal (saat ini berjumlah 9 orang).	Akselerasi Sumber Daya: Kontraktor wajib menambah jumlah personel tenaga kerja serta mempercepat pengadaan material besi beton untuk kebutuhan fabrikasi struktur hingga lantai 2.





INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Mobilisasi Material Lambat: Kecepatan mobilisasi material utama di lapangan masih kurang memadai untuk mendukung percepatan pekerjaan.	Disiplin Pelaporan: Penerapan mekanisme pelaporan yang ketat sesuai jadwal <i>cut-off</i> hari Minggu, pelaporan ke Satker hari Senin, dan pelaporan ke Pusat hari Selasa untuk validitas data pemantauan.
G. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan		
Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Permasalahan Keuangan (Upah Tukang): Terdapat kendala pencairan upah Kepala Tukang di Desa Koto Bento dan Desa Koto Keras melalui Bank BNI. Hal ini menjadi krusial mengingat Kepala Tukang Desa Koto Bento berencana meninggalkan lokasi untuk pekerjaan lain, dan Kepala Tukang Desa Koto Keras telah pindah domisili ke Medan.	Koordinasi dengan Pihak Terkait: Mencari solusi terbaik melalui koordinasi segitiga antara Satker/PPK dan Bank Penyalur (BNI) untuk memastikan hak tukang terbayarkan tanpa harus melakukan pergantian personil administrasi yang rumit.
	Hambatan Cuaca: Curah hujan yang tinggi menyebabkan keterlambatan progres fisik (masih pada kisaran 0-30%) di lima desa, yaitu Desa Baru Debai, Air Teluh, Kumun Hilir, Pondok Agung, dan Pondok Tinggi.	Instruksi Percepatan Pelaksanaan Fisik: Menginstruksikan Penerima Bantuan untuk segera mempercepat pelaksanaan fisik (lembur/tambah tenaga) seketika kondisi cuaca membaik, karena batas waktu penyelesaian sudah sangat kritis.

1. Progres fisik Satker PKP Provinsi Bengkulu pada kegiatan BSPS pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan jumlah 62 unit dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dengan jumlah 59 unit, sedangkan untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah sebanyak 40 unit di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Bengkulu Tengah akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
2. Satker PKP Prov. Bengkulu melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang ada pada 4 DIPA.





LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1	Sosialisasi dan Penandatanganan Kontrak TFL BSPS Provinsi Jambi TA 2025 10 September 2025	
2	Survey Harga Toko untuk 19 September 2025	
	Survey Lokasi Rumah Susun MA Jambi 23 September 2025	

No.	Kegiatan	Dokumentasi
	<i>Survey Harga HPS Batching Plan dan Bahan Bangunan Rumah Susun</i> <i>30 September 2025</i>	

